

## ABSTRAK

Laporan Keuangan merupakan alat pertanggungjawaban bagi pengguna anggaran negara untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat mewajibkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan keuangan. Pemerintah pusat menetapkan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan transparan dan akuntabel.

Permendagri No 21 Tahun 2011 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah mewajibkan entitas akuntansi yang dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran keuangan negara untuk membuat laporan keuangan dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis akrual (*accrual based*). Kewajiban untuk menerapkan sistem berbasis akrual juga telah diatur dalam PP No 71 Tahun 2010. PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa terjadi perubahan basis untuk sistem pengelolaan keuangan daerah yang semula berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual based*) menjadi berbasis akrual (*accrual based*). PP No 71 Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa seluruh SKPD wajib menerapkan SAP berbasis akrual terhitung mulai dari dikeluarkannya peraturan ini dan paling lambat per 1 Januari 2015.

Penelitian dilakukan di SKPD kabupaten Tulungagung bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan pada 74 SKPD Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan kuesioner. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi akuntansi. Variabel terikat adalah kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Analisis regresi linear berganda diterapkan untuk menganalisis data. Hasil statistik menunjukkan bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem informasi akuntansi baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi akuntansi, dan kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.